

**SKRIPSI**

***NICHE DIPLOMACY* INDONESIA DALAM MENGHADAPI  
KONFLIK LAUT CHINA SELATAN**



**ANDI YUSRIL MUWALI**

**F0220006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2024**

**SKRIPSI**

***NICHE DIPLOMACY INDONESIA DALAM MENGHADAPI  
KONFLIK LAUT CHINA SELATAN***



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Program Studi Hubungan Internasional*

**ANDI YUSRIL MUWALI**

**F0220006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2024**

## ABSTRAK

Konflik Laut China Selatan, sebuah sengketa wilayah melibatkan sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, berpusat di sekitar perairan Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam (SDA) dan memiliki jalur perdagangan yang strategis. Sebagai rute komersial penting bagi industri logistik global, LCS memainkan peran vital dalam perekonomian kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Niche Diplomacy Indonesia dalam menghadapi Konflik Laut China Selatan serta kepentingan Indonesia dalam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Internet Based Research dan Document Based Research. Penelitian ini menggambarkan peran Indonesia sebagai mediator netral yang sangat penting dalam konflik Laut China Selatan, memfasilitasi dialog antara negara-negara terlibat. Fokusnya adalah menjaga stabilitas regional, memperjuangkan kepentingan nasional terutama dalam mempertahankan kedaulatan di sekitar Kepulauan Natuna, dan memastikan akses serta eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang stabil di kawasan Asia-Pasifik, yang berdampak positif bagi kepentingan nasional dan stabilitas regional.

**Kata Kunci :** Indonesia, Laut China Selatan, Konflik, *Middle Power*, *Niche Diplomacy*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Sengketa wilayah dimana melibatkan banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dikenal sebagai konflik Laut China Selatan, Konflik ini berpusat di sekitar perairan Laut China Selatan, yang kaya akan SDA dan memiliki jalur perdagangan yang strategis. LCS adalah subkawasan ekonomi yang signifikan di Indo-Pasifik dan salah satu rute komersial terpenting bagi sektor logistik global.<sup>1</sup> Pada Tahun 2016, perdagangan antara wilayah tersebut dan seluruh dunia adalah US \$ 3,37 triliun, dengan 40% dari jumlah itu berasal dari LNG. Sumber daya alam yang signifikan juga hadir di daerah tersebut, termasuk cadangan gas serta minyak dimana belum dikembangkan sebesar 11 Mbarel minyak serta 190 T kaki kubik gas alam.

Ketegangan atas wilayah di Laut China Selatan mempengaruhi sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Brunei, Malaysia, Vietnam, China, dan Filipina.<sup>2</sup> Laut China Selatan yakni rumah bagi cadangan gas serta minyak luas, rute komersial vital, dan klaim teritorial yang menjadi pusat konflik. Keterkaitan Indonesia dengan konflik ini terutama terkait dengan klaim teritorial yang dilakukan oleh China terhadap wilayah yang

---

<sup>1</sup> . Rene Johannes (2023) Peningkatan Ketegangan Geopolitik di Laut China Selatan, Jurnal Lemhannas RI Vol. 11 No.4

<sup>2</sup> Ambarwati, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., Nabila, N., Ramli, N., Najwa, A., & Sutriani, S. (2023). Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 240-246.

juga diakui oleh Indonesia sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

China mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan dengan dasar sejarah dan klaim historis yang luas, yang meliputi sebagian Kepulauan Natuna di perairan Indonesia. Berdasarkan sembilan garis putus, pemerintah Tiongkok telah lama mengklaim hal tersebut<sup>3</sup>. Pernyataan bahwa tidak ada dasar bagi hukum internasional ini berasal dari pertimbangan historis. Bahkan pemerintah China menyebut 9 tanda hubung ini kadang-kadang bahkan 10 atau 11 sebagai koordinat yang ambigu.

Laut China Selatan, yang merupakan rumah bagi beberapa negara Asia Tenggara. Laut China Selatan memiliki perikanan yang kaya karena kekayaan yang mengelilingi dan meluas ke seluruh wilayah; itu juga yakni laut paling signifikan dengan cara strategis serta diperebutkan di abad ke-20 satu karena perkiraan cadangan minyak serta gasnya, dimana diyakini para pejabat AS setidaknya sama akan yang ada di Meksiko serta yang terbesar kedua sesudah Arab Saudi. China, yang klaimnya atas laut ini berasal dari beberapa abad yang lalu, dicapai oleh bagian utara laut di sepanjang pantainya. Saat ini, Beijing mempertahankan lebih 95% klaimnya di Laut Cina Selatan serta mengimpor 85% minyak mentahnya dari daerah tersebut. China telah membangun 1.300 hektar lahan agar menopang besar fasilitas militernya, seperti landasan pacu dimana cukup besar menampung pembom, dan mengklaim pulau kecil di Laut China Selatan.

---

<sup>3</sup> . Firdaus (2023) Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok Di Perairan Natuna Utara, *Jurnal Ilus Constituendum*. Vol. 8 no. 2.

Pernyataan teritorial Tiongkok di Laut China Selatan didasarkan teori “*Nine Dash Line*”, dimana yaitu kebijakan pendudukan pasca Jepang diberlakukan pemerintah Tiongkok pada tahun 1947. 11 garis putus-putus Laut Cina Selatan ditunjukkan pada peta Klaim teritorial yang dibuat oleh pemerintahan Kuomintang yang terletak jauh dari daratan Tiongkok. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk mendukung klaim laut teritorial Indonesia atas Natuna dan untuk melawan klaim ilegal China di bawah hukum internasional adalah penggantian nama. Ada 3 kategori wilayah daratan di Laut Cina Selatan, yang terdiri dari pulau-pulau dan daratan yang kadang-kadang terendam.<sup>4</sup>

Kepulauan Pratas, yang berjarak sekitar 230 mil laut Barat Daya Taiwan dan Tenggara Hong Kong, merupakan kelompok pertama. Kumpulan pulau terbesar di Laut China Selatan, Kepulauan Spratly, membentuk kelompok kedua. Kepulauan, yang terdiri atas lebih 100 pulau kecil, terumbu karang, serta bukit pasir, terletak di Laut China Selatan bagian selatan. Kurang dari 100 mil laut memisahkan bagian paling selatan kepulauan Malaysia, Brunei, ataupun Pulau Palawan di Filipina. Kemudian, Kepulauan Spratly terletak lebih dari 700 mil laudari daratan China. China terletak lebih 700 mil laut jauhnya melalui Kepulauan Spratly di samping pulau-pulau. Selain pulau-pulau, ada juga wilayah yang dikenal sebagai tanah Macclesfield yang kadang-kadang terendam. Tanah ini berada di tengah-tengah Laut China Selatan, Tenggara Kepulauan Paracel. Laut China Selatan dan pulau-pulau sekitarnya secara strategis signifikan karena tiga pertimbangan.

---

<sup>4</sup> *ibid*

Pertama, perbatasan negara yang mengendalikan pulau-pulau akan ditentukan oleh tingkat pengaruhnya terhadap mereka.<sup>5</sup> Akibatnya, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara yang mengendalikan wilayah laut teritorial akan berkembang, terutama untuk negara-negara kepulauan sebagaimana didefinisikan oleh UNCLOS 1982.

Sebagai saluran yang menghubungkan Samudra Pasifik di timur serta Samudra Hindia di barat daya melalui Selat Malaka, kedaulatan atas daratan menawarkan keuntungan geostrategis bagi negara ini. Maritim China Selatan adalah jalur maritim internasional yang vital untuk kapal komersial dan kadang-kadang militer, yang merupakan penyebab kedua. Karena rute ini adalah salah satu saluran pengiriman tersibuk di dunia, rute ini sering disebut sebagai “*Maritime Superhighway*”. Melalui wilayah ini datang kapal-kapal dari lebih dari sepertiga armada dunia. Tiga kali lebih banyak kapal tanker melintasi Laut Cina Selatan seperti melewati Terusan Suez, serta 5X lebih banyak melewati Terusan Panama. Sekitar setengah dari perdagangan global diperkirakan melewati saluran air ini. Selain itu, laut ini berfungsi sebagai saluran utama untuk impor minyak bumi ke negara Asia Timur misalnya Cina, Korea Selatan, serta Jepang dari Afrika serta Timur Tengah. Batubara, bijih besi, serta gas alam cair (LNG), tiga komoditas penting untuk industri negara-negara Asia Timur, juga diangkut melalui rute ini. Selain itu, Laut Cina Selatan adalah jalur air terluas kedua setelah Mediterania dan titik masuk penting untuk rute komersial masuk dan keluar dari Asia Timur, menangani 25% dari semua lalu lintas angkutan maritim.

---

<sup>5</sup> *ibid*

Perikanan dengan potensi ekonomi dan potensi hidrokarbon yang kuat. Faktor ketiga yang menjadi perhatian utama dalam konflik Laut China Selatan adalah potensi SDA dimana sangat besar di kawasan tersebut. Minyak bumi, gas alam, serta perikanan adalah sumber daya utama yang diperkirakan melimpah di lautan di sekitarsn kepulauan tersebut. Cadangan gas serta minyak alam di Laut China Selatan yakni dimana terbesar keempat di dunia, dengan diperkirakan jumlah cadangan minyak hingga 213 miliar barel secara keseluruhan, Sekitar 105 miliar barel diyakini hadir untuk Kepulauan Paracel dan Spratly. Selanjutnya, Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan bahwa daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya hidrokarbon, dengan gas alam menyumbang antara 60 dan 70% dari sumber daya ini.

Tidak hanya sebagai ladang sumber daya alam, ada signifikansi biologis yang signifikan ke Laut China Selatan juga. Seperti tiga dari keanekaragaman hayati laut di Bumi didukung oleh ekosistem yang menjadi bagian dari wilayah ini. Oleh karena itu, kontrol atas sumber daya alam dan perlindungan lingkungan di kawasan ini menjadi faktor penting dalam dinamika konflik yang terjadi, karena berbagai negara bersaing untuk mengakses dan mengelola sumber daya tersebut. Dalam konteks ini, konflik Laut China Selatan bukan hanya mengenai klaim teritorial serta geopolitik, tetapi melalui kontrol atas sumber daya alam yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar dan mempengaruhi keberlangsungan ekosistem laut yang penting secara global.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> . Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana (2017) Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut Unclos 1982, Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Kepentingan strategis Kepulauan Spratly berasal dari tiga faktor. Pertama, kedaulatan atas pulau-pulau itu akan berdampak signifikan pada perbatasan negara dan perluasan ZEE. Kedua, Baik kapal militer maupun komersial melewati Kepulauan Spratly sebagai bagian dari rencana perjalanan global mereka. Ketiga, Ada sejumlah besar gas alam dan minyak di laut sekitar Kepulauan Spratly. China mengendalikan pulau-pulau dan terumbu karang yang dikenal sebagai Kepulauan Paracel di Laut China Selatan. 30 pulau membentuk pulau itu, yang berukuran 15.000 kilometer persegi. Pulau-pulau ini berlimpah gas dan minyak. Menurut perkiraan, Laut Cina Selatan memiliki lebih dari 213M barel cadangan minyak,

Sedangkan Kepulauan Paracel serta Spratly memiliki 105 miliar barel. Kemudian minyak bumi, daerah ini diperkirakan mempunyai pasokan sumber daya hidrokarbon berlimpah. Gas alam membentuk antara 60 dan 70% dari sumber daya hidrokarbon ini, menurut perkiraan USGS. Karena Laut China Selatan adalah komponen ekosistem yang menopang sepertiga spesies laut di Bumi, ia juga memiliki signifikansi ekologis yang signifikan.

Sengketa wilayah Laut China Selatan adalah konflik yang sangat kompleks. Konflik akan meningkat ketika enam negara terlibat dan kepentingan mereka dipertimbangkan. Ini berdampak pada tingkat keamanan regional juga. Mengenai ini, ASEAN, adalah organisasi Asia Tenggara, berfungsi sebagai pengganti untuk 4 negara anggota ASEAN dimana terlibat dalam permusuhan. Upaya diplomatik adalah cara terbaik untuk

menyelesaikan masalah wilayah laut. Indonesia jadi negara dimana secara tidak langsung terlibat pada konflik tersebut. Keterlibatan Indonesia di dalam konflik Laut China Selatan didasarkan pada berbagai kepentingan nasional. Indonesia telah menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Natuna dan menolak klaim China yang tidak sesuai akan hukum internasional, misalnya Konvensi PBB akan Hukum Laut (UNCLOS).

Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi wujud negara *middle power*, *Middle power* adalah istilah yang digunakan dalam konteks hubungan internasional untuk merujuk pada negara negara yang memiliki tingkat pengaruh, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer yang lebih tinggi dari negara negara kecil atau berkembang, tetapi belum mencapai status kekuatan besar seperti AS, Rusia, atau Tiongkok. Konsep ini tidak memiliki definisi yang baku dan sering bergantung pada konteks dan interpretasi dalam literatur akademis dan diskusi kebijakan. Rencana strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019, dimana membuktikan status kekuatan menengah Indonesia yang berkelanjutan dalam upaya kebijakan luar negerinya, dapat digunakan untuk menilai hal ini.

Penunjukan *Middle Power* terhadap Indonesia dapat ditafsirkan berdasarkan sejumlah kejadian. Pertama, Indonesia tampak lebih "sensitif" terhadap dinamika sistem internasional dalam aksi kebijakan luar negerinya sepanjang era transisi orde baru.<sup>7</sup> Menurut Brenson & Lee, bukti partisipasi Indonesia dalam berbagai forum multilateral dan posisinya sebagai titik

---

<sup>7</sup> Chapnick, A. (1999). The middle power. *Canadian Foreign Policy Journal*, 7(2), 73-82.

kontak untuk kepentingan di antara para peserta dalam hubungan internasional, seperti pengembangan komunitas keamanan ASEAN, menunjukkan kemampuan negara untuk memenuhi fungsi ini. sehingga dapat diputuskan bahwa Indonesia akan menunjukkan kemampuan *Middle Power* untuk melaksanakan kebijakan luar negeri atau membagi kekuasaannya.<sup>8</sup>

Indonesia mempunyai kepentingan strategis di dalam menjaga stabilitas serta keamanan di Laut China Selatan, mengingat pentingnya jalur perdagangan maritim dan potensi SDA dimana ada di wilayah tersebut. Di dalam menghadapi konflik Laut China Selatan, Indonesia mengadopsi pendekatan *niche diplomacy* yang berfokus pada kepentingan nasionalnya sebagai negara maritim. *Niche diplomacy* merupakan pendekatan yang berfokus pada kepentingan atau isu-isu khusus yang menjadi keahlian atau keunggulan komparatif suatu negara. Dalam artian memanfaatkan suatu potensi yang dimiliki suatu negara. Seperti contoh yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi konflik tersebut dengan menerapkan kebijakan netralitas dan dialog seperti mengedepankan dialog sebagai landasan utama dalam menangani Konflik Laut China Selatan. Pendekatan tersebut mencerminkan keinginan untuk menjaga hubungan yang baik pada seluruh pihak terlibat, termasuk negara dikawasan tersebut. Indonesia dapat memainkan peran penting didalam menghadapi konflik Laut China Selatan. Pendekatan yang spesifik memungkinkan Indonesia agar melindungi kepentingan nasionalnya, menjaga stabilitas kawasan, mengutamakan hukum internasional, dan mempromosikan

---

<sup>8</sup>. Gabriele Abbondanza (2022) Whither the Indo-Pacific? Middle power strategies from Australia, South Korea and Indonesia, *International Affairs* 98 (2).

perdamaian serta kerja sama.

Konflik Laut China Selatan mempunyai implikasi luas terhadap keamanan regional. Ketegangan dan persaingan pada wilayah ini dapat memengaruhi stabilitas politik, keamanan maritim, serta hubungan bilateral dan multilateral antara negara-negara terlibat. Sehingga, penting bagi negara terlibat dan komunitas internasional untuk terus berupaya mencari solusi damai dan berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa wilayah ini. Menurut pembedaan yang diberikan di atas, salah satu faktor utama yang mendorong perselisihan atas klaim yang bersaing di kawasan Laut Cina Selatan adalah ketersediaan sumber daya alam, yang membuat topik penelitian ini menarik.<sup>9</sup>

Adapun, inti dari permasalahan *Niche diplomacy* bagi Indonesia dalam Laut China Selatan adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan dan keahliannya sebagai mediator dalam konflik tersebut secara efektif. Hal ini penting untuk memahami tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh Indonesia dalam perannya sebagai mediator, termasuk dinamika politik regional, persepsi negara-negara terkait terhadap Indonesia, dan kendala internal yang mungkin membatasi peran diplomatiknya. Penelitian lebih lanjut akan membantu mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam memperkuat peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan, serta memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan isu tersebut.

---

<sup>9</sup> . Polanunu, Abdul Basir Donny, and Demeiati Nur Kusumaningrum. "Indonesia sebagai middlepower: strategi niche diplomacy dalam manifestasi pembangunan kelautan berkelanjutan berbasis blue economy." *Padjadjaran Journal of International Relations* 4.2 (2022): 146-163.

## 1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah mengkaji tentang *niche diplomacy* Indonesia didalam konflik laut china selatan, penelitian mengfokuskan fenomena yang terjadi pada tahun 2018 – 2022 dimana dalam rentang 2018 – 2022, konflik antara Indonesia dan China terkait Laut China Selatan menunjukkan ketegangan yang berkepanjangan terkait klaim wilayah maritim Indonesia dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah tersebut, berseteru dengan klaim China yang saling bertentangan. Meskipun upaya diplomasi dilakukan, perbedaan pandangan dan klaim wilayah yang tumpang tindih tetap menjadi hambatan. Dengan demikian, konflik ini menunjukkan kesulitan mencapai solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Klaim teritorial Tiongkok di Laut China Selatan didasari teori “*Nine Dashe Line*”, dimana kebijakan pendudukan pasca-Jepang diberlakukan pemerintahan Tiongkok pada tahun 1947. 11 garis putus-putus Laut Cina Selatan ditunjukkan pada peta klaim teritorial yang dibuat oleh Pemerintah Kuomintang yang terletak jauh dari Daratan Tiongkok. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk mendukung klaim Laut teritorial Indonesia atas Natuna dan untuk melawan klaim ilegal. Penelitian ini akan menganalisa dua pertanyaan penelitian yaitu ;

1. Bagaimana *Niche Diplomacy* Indonesia dalam menghadapi Konflik Laut China Selatan?
2. Apa Kepentingan Indonesia di dalam Konflik Laut China Selatan?

## 1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan ingin didapatkan peneliti ketika menjalankan penelitian ini

didasarkan pada bagaimana situasi saat ini dirumuskan. Tujuan-tujuan ini adalah: Agar memahami Niche Diplomacy Indonesia didalam menghadapi Konflik Laut China Selatan

1. Untuk menganalisis *Niche Diplomacy* Indonesia dalam menghadapi konflik Laut China Selatan
2. Untuk mengetahui kepentingan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

penelitian ini memperjelas dan memperluas konsep “*niche diplomacy*”, dengan menunjukkan bagaimana Indonesia menerapkannya dalam konteks sengketa Laut China Selatan. Ini membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana negara dengan sumber daya terbatas dapat menggunakan strategi diplomatik khusus untuk menangani konflik internasional.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pembelajaran tentang Judul “Niche Diplomacy Indonesia didalam menghadapi konflik Laut China Selatan” di lingkup Studi Hubungan Internasional Khususnya Di Universitas Sulawesi Barat.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian Kualitatif Deskriptif, ini bertujuan memahami bagaimana diplomasi Indonesia dalam konflik Laut China Selatan. Peneliti mengumpulkan

data melalui riset internet, jurnal, artikel, dan observasi pertemuan internasional, serta membaca dokumen resmi dan berita. Fokus utama adalah menganalisis proses *Niche Diplomacy* Indonesia di dalam konflik Laut China Selatan. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran peran Indonesia dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan, serta memberikan saran untuk meningkatkan diplomasi di masa depan.

#### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis memakai teknik pengumpulan data: melalui *internet based research*, *document based research* dengan melakukan studi keperpustakaan (*library research*) dalam mengumpulkan data berupa tulisan dari jurnal, buku, berita maupun media online.

#### **1.4.3 Jenis Data**

Jenis Data yang dipakai yakni jenis Data sekunder, ketika informasi dikumpulkan dari dokumentasi yang relevan dengan item penelitian melalui tinjauan literatur dari beberapa publikasi, termasuk buku, jurnal, dan sumber lain yang berfungsi sebagai referensi pendukung penelitian ini.

#### **1.4.4 Teknik Analisis**

Teknik Analisis di pakai dalam penelitian ini yakni kualitatif. Teknik analisis data didalam penelitian ini ada beberapa tahap yakni mengklasifikasi data, kategorisasi, kemudian data dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan teori atau konsep yang sudah dipersiapkan. Dari proses tersebut, maka akan dihasilkan sebuah konstruksi pemahaman tentang fenomena yang di teliti.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ada bagian awal memuat sampul, logo Universitas Sulawesi Barat, nama mahasiswa, nama program studi, nama fakultas serta nama Universitas. Selanjutnya, memuat tentang judul penelitian yang berjudul “*Niche Diplomacy* Indonesia dalam Menghadapi Konflik Laut China Selatan”.

Bab I: Pada bab ini isinya latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, manfaat serta tujuan penelitian.

Bab II: Pada bab ini akan isinya akan telaah konseptual serta telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian. Konsep yang digunakan adalah konsep *Niche Diplomacy* dan Kepentingan Nasional

Bab III: Pada bab ini membahas tentang Konflik Laut China Selatan, Perkembangan Konflik laut China selatan, dan Posisi Indonesia di dalam konflik laut China Selatan

Bab IV: Pada bab ini memuat tentang pembahasan tentang upaya dan melihat seberapa efektif *niche diplomacy* Indonesia dalam menghadapi Konflik Laut China Selatan dan Kepentingan Indonesia di dalam konflik laut China Selatan

Bab V : Pada bab ini isinya mengenai penutup berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran.

## BAB II

### TELAAH TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Telaah Konseptual

##### 2.1.1 *Niche Diplomacy*

*Niche Diplomacy* adalah gaya diplomasi yang digunakan oleh negara-negara dengan kekuatan menengah, seperti Indonesia, untuk mencapai kebijakan luar negeri dan menjaga eksistensinya dalam hubungan antarnegara. Kekuatan negara middle power sangat berbeda dengan negara adidaya, karena mereka lebih bergantung pada diplomasi daripada gaya diplomasi yang melibatkan penggunaan kekuatan politik, ekonomi, dan militer.<sup>10</sup>

*Niche diplomacy* adalah Konsep dalam diplomasi internasional yang menekankan pada identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan keunggulan komparatif atau kepentingan spesifik suatu negara dalam hubungan internasional. Istilah "*niche*" berasal dari bahasa Prancis yang berarti "pemahaman spesifik" atau "ruang khusus," dan dalam konteks diplomasi, mengacu pada peran atau kontribusi unik suatu negara dalam panggung global.

Menurut Gareth Evans *Niche Diplomacy* merujuk pada strategi diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara kecil atau negara-negara yang memiliki kepentingan khusus tertentu di arena internasional. Evans, dalam bukunya yang berjudul "*Cooperating for Peace: The Global Agenda for the 1990s and Beyond*", mengembangkan konsep ini dengan fokus pada bagaimana negara-negara

---

<sup>10</sup> . Sari, RandyDesvita (2014) *Analisis Niche Diplomacy Norwegia Di Bidang Perdamaian*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

kecil atau yang memiliki sumber daya terbatas dapat mencari dan memanfaatkan peran mereka di dalam sistem internasional yang kompleks. Pendekatan niche diplomacy mengajukan bahwa negara-negara kecil atau negara-negara yang tidak memiliki kekuatan besar secara ekonomi atau militer dapat menciptakan pengaruh dan dampak yang signifikan dengan fokus pada area-area khusus atau isu-isu tertentu. Ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa, bekerja melalui organisasi internasional, atau menggunakan diplomasi langsung yang terfokus. Evans menekankan pentingnya untuk negara-negara kecil untuk mengidentifikasi kekuatan unik mereka, seperti akses ke sumber daya alam tertentu, posisi geografis strategis, atau komitmen terhadap isu-isu global tertentu seperti perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, atau lingkungan hidup. Dengan memanfaatkan kekuatan ini secara efektif, negara-negara tersebut dapat memainkan peran yang lebih besar daripada yang mungkin diharapkan berdasarkan ukuran atau kekayaan mereka.

Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi keahlian, sumber daya, atau kepentingan khusus suatu negara yang membedakannya dari negara lain, seperti bidang lingkungan, perdamaian, perdagangan, atau teknologi. Kemudian, negara tersebut mengembangkan peran atau kontribusi uniknya dalam diplomasi internasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif tersebut untuk mempromosikan kepentingan nasional dan membangun citra positif di tingkat global. Melalui pendekatan ini, negara dapat memainkan peran yang lebih signifikan dan mempengaruhi kebijakan global dalam bidang atau isu tertentu, meningkatkan citra dan reputasi mereka di tingkat internasional.

Indonesia, sebagai negara kekuatan menengah di Asia, menggunakan *Niche Diplomacy* untuk menghadapi tantangan internasional dan menciptakan norma global. *Niche diplomacy* Indonesia dalam konflik Laut China Selatan dapat dilihat dari upaya Indonesia dalam memainkan peran mediator dan perdamaian dalam menangani sengketa tersebut. *Niche diplomacy*, atau diplomasi yang berfokus pada keahlian atau kepentingan spesifik suatu negara, menjadi relevan dalam konteks ini karena Indonesia memiliki sejumlah karakteristik dan keunggulan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi damai dalam konflik tersebut.<sup>11</sup>

Pertama, Indonesia memiliki reputasi sebagai negara yang netral dan moderat dalam hubungan internasional. Sebagai pendiri Gerakan Non-Blok dan aktor kunci dalam ASEAN, Indonesia memiliki kredibilitas dan pengalaman dalam mengelola konflik antar negara. Dengan demikian, Indonesia dapat menggunakan posisinya sebagai mediator yang dihormati oleh kedua belah pihak untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan.

Kedua, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Konflik di Laut China Selatan memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas regional dan mengganggu perdagangan serta kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian, Indonesia memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam menyelesaikan konflik tersebut demi kepentingan regional yang lebih luas.

---

<sup>11</sup>. Meltum Muftuler (2020) middle Power diakses pada <https://www.britannica.com/print/article/381411> tanggal 20 Maret 2024

Ketiga, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan berbagai negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Melalui diplomasi bilateral dan multilateral, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baiknya dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN lainnya untuk mempromosikan dialog dan kerjasama dalam menangani sengketa di Laut China Selatan. Dengan demikian, keterkaitan niche diplomacy Indonesia dalam konflik Laut China Selatan terletak pada kemampuannya untuk menggunakan reputasi netralitasnya, kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas regional, dan hubungan baik dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi damai dalam konflik tersebut.

### **2.1.2 Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional adalah elemen utama dalam setiap kebijakan luar negeri suatu negara, mencerminkan upaya untuk melindungi dan mempertahankan diri dari ancaman serta memastikan pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Ini mencakup aspek vital seperti menjaga kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan keamanan militer dari berbagai ancaman yang mungkin timbul baik melalui didalam ataupun dari luar. Kemudian, kesejahteraan ekonomi pun jadi bagian penting dari kepentingan nasional, karena negara berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>12</sup>

Dalam setiap keputusan atau tindakan dimana diambil didalam hubungan dengan negara lainnya, kepentingan nasional senantiasa menjadi prioritas utama bagi pemerintah suatu negara, baik dalam upaya memperkuat hubungan bilateral maupun dalam menanggapi ancaman terhadap keamanan dan keberlangsungan

---

<sup>12</sup> · Kementerian Pertahanan (2015) Buku Putih Pertahanan Indonesia, Diakses pada 5 Juli 2024,

nasional. Oleh karena itu, kepentingan nasional menjadi landasan untuk pembentukan kebijakan luar negeri dan merupakan faktor penting dalam dinamika hubungan internasional yang selalu berubah.<sup>13</sup>

Kepentingan Nasional yakni sebuah tujuan fundamental yang menjadi faktor penentu akhir dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri sebuah negara.

Kepentingan nasional suatu negara seringkali merupakan hasil dari kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan, dan dapat bervariasi ataupun hingga bertentangan antara satu akan yang lainnya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau juga memperhitungkan kekuasaan serta kepentingan menjadi sarana serta tujuan utama melalui tindakan politik internasional. Pengambilan keputusan terkait kepentingan nasional pun dipengaruhi tradisi politik serta konteks budaya didalam politik luar negeri, serta ditentukan negara bersangkutan. Kepentingan nasional sering kali terkait dengan kebutuhan paling vital bagi negara, misalnya keamanan, pertahanan, militer, serta kesejahteraan ekonomi. Morgenthau menekankan jika kepentingan nasional yakni kapasitas minimal suatu bangsa untuk menjaga identitas fisik, politik, dan budayanya aman dari campur tangan luar. Menurut sudut pandang ini. Para pemimpin negara membangun pendekatan yang berbeda terhadap negara lain, baik dalam hal kolaborasi maupun konfrontasi, berdasarkan pada kepentingan nasional yang

---

<sup>13</sup> . Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 2(2), 70-95.

dihadapi. Setelah Perang Dunia II, metode ini telah memimpin dalam studi urusan internasional.<sup>14</sup>

## 2.2 Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ini, Penulis mengumpulkan informasi dari penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan kemudian menjabarkan poin letak perbedaannya.

Pertama, Jurnal artikel ditulis Abdul Basir Donny Polanunu, Demeiati Nur Kusumaningrum (2022) Yang berjudul “*Indonesia Middle Power: Strategi Niche Diplomacy* dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis *Blue Economy*”. penelitian ini membahas tentang Tujuan khusus penelitian ini yakni agar menguji bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan pembangunan maritim berkelanjutan mengingat statusnya sebagai negara *Middle Power*. Jurnal ini di jadikan sebagai telaah pustaka dikarenakan memiliki kesamaan yang sama – sama membahas mengenai posisi Indonesia sebagai negara *Middle power*.<sup>15</sup> Dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana Indonesia membuktikan peranannya sebagai negara *Middle power* melalui program pembangunan berkelanjutan.

Penulis menganalisis isu-isu dalam penelitian ini memakai kerangka teori identitas *Niche Diplomacy* serta *Middle Power*. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dan dijelaskan melalui penggunaan teknik penjelasan. Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memasukkan pembangunan laut berkelanjutan sebagai prioritas utama ke dalam

---

<sup>14</sup>. Cornelia Navari (2016) Hans Morgenthau and The National Interest, Cambridge : Cambridge University Press, 11(2), 110-125.

<sup>15</sup> . Abdul Basir Donny Polanunu, Demeiati Nur Kusumaningrum (2022) “Indonesia Middle Power: Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis *Blue Economy*” *Jurnal Padjir Vol. 4 No.2*

kebijakan kelautan nasionalnya dan didedikasikan untuk memanfaatkan konsep ekonomi biru untuk mendukung pembangunan laut berkelanjutan global.

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Aulia Ambrawati dkk (2023) yang berjudul “Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan”.

<sup>16</sup>Jurnal ini menjelaskan tentang Makalah penelitian ini mengkaji pengaruh sumber daya alam terhadap konflik internasional, dengan fokus pada studi kasus sengketa Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan yakni wilayah kaya SDA, termasuk gas, minyak serta perikanan, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan teritorial. klaim di antara beberapa negara di kawasan. Tujuan penelitian ini yakni agar menganalisa hubungan antara SDA serta eskalasi konflik di Laut Cina Selatan. Temuan menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya alam di Laut Cina Selatan berkontribusi signifikan pada konflik di Laut Cina Selatan. meningkatnya konflik di kawasan. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya energi, perikanan, dan kendali strategis sudah mengembangkan persaingan dan sengketa wilayah di antara negara pengklaim.

Jurnal ini dijadikan sebagai telaah pustaka karena memiliki kesamaan yang sama sama membahas terkait kekayaan sumber daya alam yang berada di wilayah Laut China Selatan yang menjadi penyebab konflik di kawasan tersebut.

Ketiga, Jurnal Skripsi yang di tulis Yuriko (2022) dengan judul “*Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Prespektif Konvensi Wina 196*”. <sup>17</sup>Menurut gagasan ini, lautan adalah wilayah daratan yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap negara di Bumi dan berfungsi sebagai perbatasan

---

<sup>16</sup> . Aulia Ambrawati dkk (2023) “Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di KawasanLaut China Selatan” Jurnal JULIA Vol. 10 No.3

<sup>17</sup> . Yuriko (2022) “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina SelatanDalam Prespektif Konvensi Wina 1961”, UM Sumatra Utara : Medan

bagi negara lain. Diantaranya adalah Laut Cina Selatan, dimana ada di Asia Tenggara. Banyak negara, termasuk Taiwan, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Filipina, serta Brunei, mengelilingi laut ini. Dengan demikian, karena lokasinya yang sangat menguntungkan dan fakta bahwa itu dikelilingi oleh banyak negara Asia, itu menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut. Karena wilayah yang disengketakan dekat dengan perbatasan Indonesia, konflik ini menimbulkan bahaya bagi banyak negara tetangga, khususnya Indonesia. Akibatnya Indonesia berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan melalui hubungan diplomatik. Jurnal tersebut memberikan wawasan baru karena membahas penyelesaian konflik laut china selatan dalam prespektif Konvensi Wina 196 sehingga peneliti dapat mengembangkan sumber daya baru. Peneliti mendapat banyak informasi sebagai penunjang untuk penyusunan dan pustaka. Dengan demikian, perbedaan antara jurnal dan judul skripsi adalah topik yang di bahas.

menantang kebijakan niche diplomacy Indonesia. Pahami bagaimana interaksi antara pemerintah dan aktor non-negara ini mempengaruhi implementasi dan keberhasilan strategi diplomatik.

5. Penulis menyarankan untuk menganalisis bagaimana Indonesia mengintegrasikan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan dalam strategi diplomatiknya. Fokus pada kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut sambil menangani sengketa teritorial, serta keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bond. L. (2021), "*Shattered Trident*, Konflik Laut Cina Selatan". Sleman, Yogyakarta. Andi Publisher
- Cooper. F.A. (1997), "*Niche Diplomacy: Middle Powers After the Cold War*" Britania Raya, London. Macmillan,
- Darusman, Y. M. (2022). Konvensi Internasional (Pelaksanaan dan Pengawasannya). Pascal Books.
- Emmers.R & Teo. S.(2018) "*Security Strategies of Middle Powers in the Asiapacific*". Australia, Melbourne University publishing.
- Galuh, A. K., Utami, A. F., & Widiyanti, D. R. (2022). Sejarah Pemikiran Ekonomi. Universitas Brawijaya Press.
- Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia. Prenada Media.
- Risnain. M. (2020) "Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional" Mataram, Sanabil.
- Rosyidin, M (2020) *Teori Hubungan Internasional : Dari perspektif klasik Sampai Non-Barat*, Depok PT RajaGrafindo Persada
- Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. (2023). Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global. Indonesia Emas Group
- Setiawati, R. I. S. (2021). Buku Ajar Bisnis dan Perdagangan Internasional. Simanjuntak. M.(2020) "konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut Edisi 2" Bogor, Mitra Wacana Media.
- Storey.I. & Yi. C.L.(2016) "*Navigating Diplomatic And Strategic Tensions*".
- Heng Mui Keng Ter, Singapura. Institut Yusof Ishak.
- Wangke, H. (2021). Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yustiningrum, R. E., Ramadhan, M. S., Anwar, D. F., Wuryandari, G., Alami, A. N., Prabaningtyas, R. R. F., & Elisabeth, A. (2024). Indo-Pasifik Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Dimensi Geopolitik, Geostrategi, & Geoeкономи. Penerbit Andi.

## Jurnal

- Abdul Basir Donny Polanunu, Demeiati Nur Kusumaningrum (2022) "Indonesia Middle Power: Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis *Blue Economy*" *Jurnal Padjir Vol. 4 No.2*
- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1).
- Ambarwati, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., Nabila, N., Ramli, N., Najwa, A., & Sutriani, S. (2023). Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 240-246
- Anita Wijayanti (2022) Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, *Kybernology Vol.2 No.2*
- Asmara, A. Y. (2012). Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia Di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2(2), 131-144.
- Aulia Ambrawati dkk (2023) "Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan" *Jurnal JULIA Vol. 10 No.3*
- Cornelia Navari (2016) *Hans Morgenthau and The National Interest*, Cambridge :Cambridge University Press
- Firdaus (2023) Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara, *Jurnal Jus Constituendum Vol. 8 No.2*
- Gabriele Abbondanza (2022) *Whither the Indo-Pacific? Middle power strategies from Australia, South Korea and Indonesia*, *International Affairs* 98 (2).
- Hutahaean, G. M. N. (2024). *Asean Outlook On The Indo-Pacific* Sebagai Strategi Diplomasi Indonesia Di Asean Pada Kawasan Indo-Pasifik Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Tahun 2019-2023 (DoctoralDissertation, Universitas Nasional).
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219-240.
- Kantjai, M. (2019). Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Pbb Tahun 1982. *Lex Privatum*, 7(1).
- La Ode Hendra, L. O. (2013). Peranan Indonesia Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Atas Klaim Beberapa Negara Asean Dan Cina Terhadap Kepulauan Spratly Di Laut Cina Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Meltum Muftuler (2020) *middle Power* diakses pada <https://www.britannica.com/print/article/381411> tanggal 20

Maret 2024

- Moniek, M. (2017). Peran Komunitas Epistemik dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Kerangka Asean *Political-Security Community*. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 3(2).
- Polanunu, Abdul Basir Donny, and Demeiati Nur Kusumaningrum. "Indonesia sebagai middle power: strategi niche diplomacy dalam manifestasi pembangunan kelautan berkelanjutan berbasis blue economy." *Padjadjaran Journal of International Relations* 4.2 (2022): 146-163.
- Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana (2017) Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut Unclos 1982, *Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya Yogyakarta*.
- Rene Johannes (2023) Peningkatan Ketegangan Geopolitik di Laut China Selatan, *Jurnal Lemhannas RI Vol. 11 No.4*
- Ruslijanto, P. A., Puspitawati, D., Kusumaningrum, A., Ula, H., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Sanjiwani, N. P. A., Mardialina, M., & Rizki, K. (2022). Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 66-85.
- Sari, H. (2022). Pengaruh Hukum Laut Internasional Terhadap Sengketa Wilayah Maritim Di Laut China Selatan. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 21(2), 115-123.
- Sari, Randy Desvita (2014) *Analisis Niche Diplomacy Norwegia Di Bidang Perdamaian*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Sibarani, J. C., Prabowo, A., & Purba, B. (2023). Peran Teori Klasik Dalam Pembentukan Pemikiran Ekonomi Modern. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Sudiro, H. A. M. (2018). Analisis Biaya Peluang (*Opportunity Cost*) Sebagai Pekerja Di Sektor Pariwisata: Studi Kasus Pada Penduduk Di Desa Ranupani Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Toruan, G. T. L. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111-129.
- USCIS (2022) *Guidance on National Interest Waivers* diakses pada <https://www-uscis-gov.translate.goog/newsroom/alerts/uscis-updates-guidance-on-national-interest-waivers? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>  
Tanggal 20 Maret 2024

## **Skripsi**

- Andriyani, A. Peran Indian *Ocean Rim Association* (IORA) Dalam Menjaga Keamanan Di Wilayah Perairan Indonesia: Studi Kasus Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia Periode 2017-

2021 (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).